A. CONTOH FORMAT RISALAH HASIL PRA PTL DAN PTL ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ITWASUM POLRI/BPK RI

KOPSTUK

CONTOH

RISALAH HASIL PRA PTL DAN PTL
ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
ITWASUM POLRI/BPK RI T.A.20... 1)

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS TEMUAN 12)			KETERANGAN
				S	BS	BD	
1	2	3	4	5	6	7	8
8)	9)	10)	11)				13)

Jumlah Temuan :
Jumlah Sesuai :
Jumlah belum sesuai : } 2)

....., ... 20.. 3)

IRWASDA/KASATKER

..... } 4)
.....

IRBIDJEMEN .....
SEBAGAI KETUA TIM .....

..... } 6)
.....

KASUBBIDBIA DAN APK BIDKEU

..... } 5)
.....

AUDITOR .....
SEBAGAI ANGGOTA

..... } 7)
.....

AUDITOR .....
SEBAGAI ANGGOTA

..... } 7)
.....

Catatan:

Sebutan Itwasum Polri/BPK RI coret salah satu disesuaikan pra PTL/PTL rekomendasi yang dilaporkan

Keterangan .....

Keterangan:

1. berisi nama Satker yang menjadi entitas dan temuan atas laporan keuangan tahun yang dipraPTLkan;
2. berisi jumlah temuan yang di praPTLkan, jumlah hasil uji nilai yang dikonsultasikan mendapat status Sesuai menurut APIP dan jumlah hasil uji nilai yang dikonsultasikan mendapat status Belum Sesuai menurut APIP;
3. berisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pra PTL;
4. berisi nama, pangkat dan NRP pejabat dari Irwasda yang mewakili Polda atau Kasatker Mabes Polri;
5. berisi nama, pangkat dan NRP pejabat dari Kasubbidbia dan APK Bidkeu;
6. berisi nama, pangkat dan NRP dari APIP Polri yang ditunjuk sebagai Ketua Tim;
7. berisi nama, pangkat dan NRP dari APIP Polri yang ditunjuk sebagai Anggota;
8. kolom 1, berisi nomor urut;
9. kolom 2, berisi temuan hasil pemeriksaan;
10. Kolom 3 berisi rekomendasi atas temuan;
11. kolom 4, berisi tindak lanjut hasil konsultasi yang diberikan oleh pemeriksa kepada entitas/Obrik;
12. kolom 5, 6, 7 berisi status temuan berupa hasil uji nilai yang dinyatakan dengan:
    a. Belum Sesuai/BS;
    b. Belum Dipantau/BD; dan
    c. Sesuai/S.
13. kolom 6, berisi keterangan atas rekomendasi yang mendapat status BS atau BD

B. CONTOH .....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ITWASUM POLRI/BPK RI

KOPSTUK

CONTOH

LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ITWASUM POLRI/BPK RI TANGGAL .... S.D. .... 20..

I. PENDAHULUAN

1. Umum:

   Berisi latar belakang dilaksanakannya Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI termasuk sasaran rekomendasi temuan Itwasum Polri/BPK RI yang dibahas.

2. Dasar:

   Berisi surat-surat terkait dengan diselenggarakannya PTL BPK RI.

3. Maksud dan tujuan:

   a. Maksud

      untuk memberikan gambaran kepada pimpinan sampai sejauhmana hasil pelaksanaan pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI pada Objek Wasrik di lingkungan Polri.

   b. tujuan

      agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan Polri dalam menentukan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan temuan Itwasum Polri/BPK RI yang menjadi sasaran Pemantauan Tindak Lanjut Itwasum Polri/BPK RI.

4. Ruang lingkup

   Ruang lingkup laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI pada Objek Wasrik di lingkungan Polri dengan Auditor Itwasum Polri/BPK RI meliputi penuntasan rekomendasi temuan dalam bentuk tabulasi disertai dengan bukti pendukung berupa bukti setor ke kas negara dan/atau bukti kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dan/atau surat teguran tertulis dan/atau naskah pedoman yang harus disusun berupa peraturan dan lain-lain.

5. Tata.....

5. Tata urut

I PENDAHULUAN

II PELAKSANAAN

III HASIL PELAKSANAAN

IV KESIMPULAN DAN SARAN

V PENUTUP

II. PELAKSANAAN

6. pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI, yaitu:

a. sasaran Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI, yaitu:

NO	SATKER	LHP	JML	SESUAI (S)	BELUM SESUAI (BS)	BELUM DIPANTAU (BD)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
2. kolom 2, berisi Satker yang menjadi entitas PTL oleh BPK RI;
3. kolom 3, berisi jenis dan tahun laporan hasil pemeriksaan BPK RI;
4. kolom 4, berisi jumlah rekomendasi temuan yang menjadi sasaran PTL BPK RI sesuai jenis dan tahun laporan hasil pemeriksaan BPK RI;
5. kolom 5, berisi rekomendasi yang dinilai oleh BPK RI telah Sesuai (S) apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat yang diperiksa telah menjawab rekomendasi disertai bukti secara lengkap;
6. kolom 6, berisi rekomendasi yang dinilai oleh BPK RI Belum Sesuai (BS) apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat menjawab rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian dan bukti belum lengkap;
7. kolom 7, berisi rekomendasi yang dinilai oleh BPK RI Belum Ditindaklanjuti (BD) apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/ pejabat yang diperiksa belum menjawab rekomendasi; dan
8. kolom 8. Berisi keterangan tentang rekomendasi temuan yang berstatus BS dan BD.

b. nama peserta yang hadir pada pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI:

1) nama peserta dan pendamping di lingkungan Polri:

NO	PANGKAT DAN NAMA PEJABAT	JABATAN
1	2	3

Keterangan.....

Keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
2. kolom 2, berisi pangkat dan nama pejabat yang hadir pada pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas tanggapan rekomendasi temuan BPK RI; dan
3. kolom 3, berisi jabatan peserta rapat sesuai kolom 2.

2) nama peserta dari BPK RI:

NO	PANGKAT DAN NAMA PEJABAT	JABATAN
1	2	3

Keterangan sama dengan penjelasan pada angka II, angka 6 huruf b angka 1) di atas.

c. jadwal pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI:

1) hari ....., tanggal .... 20..:

a) berisi kegiatan yang dilaksanakan selama hari tersebut

2) hari ....., tanggal .... 20..:

a) berisi kegiatan yang dilaksanakan selama hari tersebut

III. HASIL PELAKSANAAN

7. berisi penjelasan ringkas hasil pelakaanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI dan rekapitulasi perkembangan status penilaian yang diberikan oleh Itwasum Polri/BPK RI atas sasaran pelaksanaan pemantauan:

NO	SATKER	LHP	JML	SESUAI (S)	BELUM SESUAI (BS)	BELUM DIPANTAU (BD)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

Keterangan sama dengan penjelasan pada angka II, angka 6 huruf a di atas.

a. dari hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI Tahun 20.., terjadi peningkatan penyelesaian rekomendasi temuan BPK RI, dengan rincian sebagai berikut:

STATUS PENILAIAN ATAS REKOMENDASI	SEBELUM PTL	SESUDAH PTL	TREND
1	2	3	4
SESUAI (S)			↓ Atau ↑ .... %
BELUM SESUAI (BS)			
BELUM DINTINDAKLANJUTI (BD)			

Keterangan.....

Keterangan:

1. kolom 1, berisi jenis status penilaian atas rekomendasi temuan yaitu S, BS dan BD;
2. kolom 2, berisi jumlah sebelum pelaksanaan PTL;
3. kolom 3, berisi jumlah sesudah pelaksanaan PTL; dan
4. kolom 4, berisi keterangan kenaikan dan penurunan dalam prosentase hasil pelaksanaan PTL.

b. berisi penjelasan penyebab rekomendasi temuan berstatus BS (Belum Sesuai) dan BD (Belum Ditindaklanjuti).

8. Anggaran

Berisi penjelasan dukungan anggaran pelaksanaan PTL BPK RI

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

9. Berisi penjelasan atas kesimpulan dan saran hasil pelaksanaan PTL Itwasum Polri/BPK RI.

V. PENUTUP

10. Demikian laporan hasil pelaksanaan rapat pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut atas tanggapan rekomendasi temuan Itwasum Polri/BPK RI Tahun 20..

Catatan:

Sebutan Itwasum Polri/BPK RI coret salah satu disesuaikan PTL rekomendasi yang dilaporkan

C. CONTOH .....

C. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT UNTUK TINGKAT MABES POLRI KEPADA KEMENTERIAN PAN DAN RB/TINGKAT POLDA KEPADA ITWASUM POLRI

KOPSTUK

CONTOH

LAPORAN HASIL PENGAWASAN OLEH
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI/
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisi gambaran umum perihal disusunnya laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Kapolri .....;

b. Peraturan Kapolri .....;

c. .....dst

3. Organisasi/Kelembagaan

a. kedudukan, tugas, dan fungsi tercantum pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkap nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

b. pembagian tugas dan tanggung jawab tercantum pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap nomor 21 Tahun 2010/Perkap nomor 22 Tahun 2010.

1) Unsur Pimpinan:

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

3) Unsur Pelaksana Utama.

c. lain-lain pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap 21/22 Tahun 2010.

d. tata kerja pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap 21/22 Tahun 2010.

4. Visi dan Misi Polri/Polda

a. berisi Visi dan misi Polri/Polda, untuk:

1) Itwasum Polri bersumber dari visi dan misi Polri 20..-20.. tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) Polri; dan

2) Itwasda bersumber dari visi dan misi Polda 20.. – 20.. tercantum pada Renstra Polda;

b. berisi.....

b. berisi Visi dan misi Itwasum Polri/Itwasda, untuk:

1) Itwasum Polri bersumber dari visi dan misi Itwasum Polri 20.. - 20.. tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) Itwasum Polri; dan

2) Itwasda bersumber dari visi dan misi Itwasda 20.. – 20.. tercantum pada Renstra Itwasda.

5. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Jangka Menengah Polri/Polda

berisi tujuan jangka menengah Polri (untuk Itwasum Polri)/Polda (untuk Itwasda) sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Polri/Polda.

b. Tujuan Jangka Menengah Itwasum Polri/Itwasda

berisi tujuan jangka menengah Itwasum Polri (untuk Itwasum Polri)/Polda (untuk Itwasda) sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Itwasum Polri/Itwasda.

6. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polri/Polda

berisi sasaran prioritas Polri (untuk Itwasum Polri)/Polda (untuk Itwasda) sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Polri/Polda.

b. Sasaran Prioritas Itwasum Polri/Itwasda

berisi sasaran prioritas Itwasum Polri/Itwasda sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Itwasum Polri/Itwasda.

7. Program Pengawasan 20..

Berisi program Itwasum Polri/Itwasda pada Tahun Anggaran Berjalan.

8. Usulan Pagu Ideal Itwasum Polri/Itwasda

a. Berisi rekapitulasi dukungan anggaran yang tercantum pada Rencana Kerja (Renja) Satker Itwasum Polri/Itwasda Tahun Anggaran Berjalan beserta tabel rincian perprogram anggaran; dan

b. Berisi rekapitulasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran Berjalan pada saat dilaporkan.

9. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Tahunan 20..

Berisi informasi capaian kinerja, bahan evaluasi peningkatan kinerja, menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan, dan informasi bahan untuk pengambilan putusan dan penetapan kebijakan pimpinan.

BAB II.....

BAB II
SUMBER DAYA PENGAWASAN

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 20..

Berisi uraian kondisi tentang SDM pada Inspektorat Pengawasan Umum/ Inspektorat Pengawasan Daerah Tahun Anggaran Berjalan, meliputi:

a. uraian jabatan, pada:

tingkat Mabes Polri pada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri (untuk Itwasum Polri):

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4
1.	UNSUR PIMPINAN: a. IRWASUM b. WAIRWASUM		DIISI BILA PERLU
2.	UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF: a. KARORENMIN b. KABAG c. KASUBBAG d. URMIN e. URTU		
3.	UNSUR PELAKSANA UTAMA: a. INSPEKTUR WILAYAH (IRWIL) b. INSPEKTUR BIDANG (IRBID) c. AUDITOR d. URTU		
4.	LAIN-LAIN: a. KEPALA URUSAN KEUANGAN (KAURKEU) b. KEPALA TATA USAHA DAN URUSAN DALAM (KATAUD) c. URTU d. URMIN		
	JUMLAH		

tingkat Polda pada Inspektorat Daerah (untuk Itwasda):

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4
1.	INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH (IRWASDA)		DIISI BILA PERLU
2.	KEPALA SUB BAGIAN (KASUBBAG): a. KASUBBAG PERENCAAN DAN ADMINISTRASI (KASUBBAGRENMIN): 1) URUSAN PERENCANAAN (URREN) 2) URUSAN ADMINISTRASI (URMIN) 3) URUSAN KEUANGAN (URKEU) 4) URUSAN TATA USAHA (URTU)		

b. KASUBBAG.....

1	2	3	4
	b. KASUBBAG PENGADUAN MASYARAKAT DAN ANALISIS (KASUBBAGDUMASAN): 1) URUSAN PENGADUAN MASYARAKAT (URDUMAS) 2) URUSAN DATA (URDATA) 3) URUSAN ANALISIS (URNALIS)		
3.	INSPEKTORAT BIDANG (IRBID): a. IRBID OPERASIONAL (IRBIDOPS): 1) PERWIRA PEMERIKSA (PARIK) 2) AUDITOR b. IRBID PEMBINAAN (IRBIDBIN): 1) PERWIRA PEMERIKSA (PARIK 2) AUDITOR		

b. berisi uraian SDM berdasarkan pangkat/golongan pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri/Inspektorat Pengawasan Daerah:

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	**POLRI**		
1.	PERWIRA TINGGI	DIISI JUMLAH ORANG PERWIRA TINGGI	DIISI BILA DIPERLUKAN
2.	PERWIRA MENENGAH: a. KOMBES b. AKBP c. KOMPOL	DIISI JUMLAH ORANG PAMEN SESUAI KEPANGKATAN	
3.	PERWIRA PERTAMA: e. AKP f. IPTU g. IPDA	DIISI JUMLAH ORANG PAMA SESUAI KEPANGKATAN	
4.	BINTARA: a. AIPTU b. AIPDA c. BRIPKA d. BRIGADIR e. BRIPTU f. BRIPDA	DIISI JUMLAH ORANG BINTARA SESUAI KEPANGKATAN	
II	**PNS**		
5.	PNS: a. GOLONGAN IV b. GOLONGAN III c. GOLONGAN II d. GOLONGAN I	DIISI JUMLAH ORANG PNS SESUAI GOLONGAN	
6.	HONORER		
	JUMLAH		

c. berisi.....

c. berisi uraian SDM berdasarkan pendidikan pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri/Inspektorat Pengawasan Daerah:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4
1.	PENDIDIKAN POLRI: a. LEMHANNAS b. SESPATI c. SESPIM d. SELAPA	Diisi jumlah personel yang mengikuti pendidikan Polri	Diisi bila diperlukan
2.	PENDIDIKAN UMUM: a. S3 b. S2 c. S1 d. D1 – D3 e. SLTA/SLTP	Diisi jumlah personel yang mengikuti pendidikan umum	
	JUMLAH		

d. Perkembangan kualifikasi tenaga pengawas

Perkembangan kualifikasi tenaga pengawas Inspektorat Pengawasan Umum Polri/Inspektorat Pengawasan Daerah pada tahun anggaran berjalan:

NO	KUALIFIKASI	TAHUN	
		20.. (ORANG)	20.. (ORANG)
1	**2**	**3**	**4**
1.	Auditor Ahli Utama	-	-
2.	Auditor Ahli Madya	-	-
3.	Auditor Ahli Muda	-	-
4.	Auditor Ahli Pratama	-	-
5.	Auditor Penyelia	-	-
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-
7.	Auditor Pelaksana	-	-
8.	Belum lulus sertifikasi JFA	-	-
	Jumlah	-	-

2. Dana Operasional Pengawasan

Perkembangan dana operasional APIP Tahun 20.. dan 20..

No	Uraian	Tahun 20.. (Rp)	Tahun 20.. (Rp)
1	**2**	**3**	**4**
1.	Dana Pengawasan		
2.	Dana yang diawasi		
3.	Persentase dana pengawasan terhadap dana yang diawasi (%)		

Keterangan:

a. Dana pengawasan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan utama pengawasan meliputi audit, evaluasi, reviu, monitoring dan kegiatan lain (pelatihan, penelitian, studi, dan seminar/lokakarya) tidak termasuk gaji dan tunjangan; dan

b. data.....

b. data dana yang diawasi adalah jumlah keseluruhan dana pada masing-masing Satker yang menjadi objek pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1) Itwasum Polri, meliputi:

a) dana yang dikelola oleh seluruh Satker pada Mabes Polri;

b) dana yang dikelola oleh seluruh Satker pada Polda; dan

c) dana yang dikelola oleh Polres.

2) Itwasda, meliputi:

a) dana yang dikelola oleh seluruh Satker pada Polda; dan

b) dana yang dikelola oleh Polres.

3. Sarana:

Perkembangan sarana pengawasan pada Itwasum Polri/Itwasda:

No	JENIS SARANA	Tahun 20..	Tahun 20..
1	2	3	4
1.	KOMPUTER		
2.	KENDARAAN DINAS RODA EMPAT		
3.	KENDARAAN DINAS RODA DUA		
4.	.....		
5.	.....		

Catatan:

Diisi dengan sarana yang sangat diperlukan dalam pengawasan seperti komputer, kendaraan dinas roda empat, roda dua, dan sarana lainnya.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN

1. Kegiatan Utama

Berisi uraian singkat kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri/Itwasda sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT dan non PKPT

a. target dan realisasi audit berdasarkan PKPT Tahun 20.. pada tahap I (pada tahun berjalan):

NO	SATUAN/UNIT KERJA YANG DIAUDIT	TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)	JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	.....				

b. target.....

b. target dan realisasi audit berdasarkan PKPT Tahun 20.. pada tahap II (pada tahun berjalan):

NO	SATUAN/UNIT KERJA YANG DIAUDIT	TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)	JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	.....				

Keterangan:

1. kolom 1, diisi nomor urut;
2. kolom 2, diisi nama Satker yang menjadi objek pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT;
3. kolom 3 dan 4, berisi target:
   a. kolom 3, target jumlah Satker yang menjadi objek pemeriksaaan; dan
   b. kolom 4, target jumlah dukungan dana dalam DIPA Satker yang menjadi objek pemeriksaan.
4. kolom 5 dan 6, berisi realisasi:
   a. kolom 5, realiasi jumlah Satker yang menjadi objek pemeriksaaan; dan
   b. kolom 6, realisasi jumlah dukungan dana Satker yang menjadi objek pemeriksaan;

c. realisasi audit non PKPT berdasarkan jenis audit Tahun 20.. (pada tahun berjalan):

NO	JENIS AUDIT	JML OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4
1.	Audit kinerja yaitu: Wasrik Rutin		
2.	Wasrik Khusus		
3.	Wasrik dengan tujuan tertentu: a. Verifikasi b. Pengawasan Operasional c. Atase/SLO Polri d. Wasrik dengan tujuan tertentu yang belum termasuk di atas, contoh: Wasrik PNBP		
4.	Reviu laporan keuangan		
	Jumlah		

Keterangan:

1. kolom 1, diisi nomor urut;
2. kolom 2, diisi dengan jenis audit yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri/Itwasda;
3. kolom 3, diisi dengan jumlah objek Audit/Pemeriksaan (OA) yang diperiksa
4. kolom 4, diisi dengan jumlah dana Satker yang menjadi objek pemeriksaan;

2. Selain .....

2. Selain pengawasan dan pemeriksaan oleh Inspektorat pengawasan, dilaksanakan pula pemeriksaan oleh BPK RI:

   a. berisi hasil pelaksanaan pemeriksaan BPK RI; dan

   b. berisi hasil pemantauan tindak lanjut pemberian status atas tanggapan rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI.

BAB IV
ANALISA HASIL PENGAWASAN

1. Obrik yang telah memberikan jawaban hasil pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Itwasum Polri/Itwasda sesuai hasil uji nilai Irbid dan Auditor Itwasum Polri/Parik dan Auditor Itwasda dapat dilihat pada tabel dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran dari Itwasum Polri/ Itwasda. Di samping pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan program sebelumya. Di bawah ini tabel Satker yang telah mengirimkan peta risiko, data penerimaan daftar hibah, tindak lanjut Wasrik Rutin, sedangkan analisa evaluasi tindak lanjut dapat dilihat pada lampiran di bawah ini untuk tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda (untuk Itwasum Polri)/tingkat Polda dan tingkat Polres (untuk Itwasda).

   a. rekapitulasi temuan dan Tinjut Wasrik Rutin di tingkat Mabes Polri/Polda/Polres Tahun 20.. pada tahap I (pada tahun berjalan):

NO	OBRIK	BIDANG				JUMLAH TEMUAN	JUMLAH SARAN
		OPS	SDM	SARPRAS	GARKEU		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Berisi unit kerja yang melaksanakan pengawasan sesuai daerah pantauan (ITWIL I/II/III/IV/ITBIDOPS/ITBIDBIN)						
1.							
2.							
	JUMLAH						

   b. rekapitulasi temuan dan Tinjut Wasrik Rutin di tingkat Mabes Polri/Polda/Polres Tahun 20.. pada tahap II (pada tahun berjalan):

NO	OBRIK	BIDANG				JUMLAH TEMUAN	JUMLAH SARAN
		OPS	SDM	SARPRAS	GARKEU		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Berisi unit kerja yang melaksanakan pengawasan sesuai daerah pantauan (ITWIL I/II/III/IV/ITBIDOPS/ITBIDBIN)						
1.							
2.							
	JUMLAH						

   Keterangan:

   1. kolom 1, berisi nomor urut;
   2. kolom 2, berisi Satker yang menjadi objek pemeriksaan;
   3. kolom 3, berisi jumlah temuan bidang Operasional (Ops);
   4. kolom 4, berisi jumlah temuan bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
   5. kolom 5, berisi jumlah temuan bidang Sarana Prasarana (Sarpras);
   6. kolom 6, berisi jumlah temuan bidang Anggaran Keuangan (Garkeu);

   7. kolom .....

7. kolom 7, berisi jumlah total temuan bidang Ops, SDM, Sarpras dan Garkeu pada Satker yang menjadi Obrik; dan
8. kolom 8, berisi jumlah saran berupa konsultasi.

c. klasifikasi kondisi temuan APIP berdasarkan PKPT:

NO	KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN	KODE	JUMLAH TEMUAN	%	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	kejadian yang merugikan negara	01			
2.	Kewajiban penyetoran kepada negara	02			
3.	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku	03			
4.	Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan	04			
5.	Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran	05			
6.	Hambatan kelancaran kegiatan	06			
7.	Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok	07			
8.	Kelemahan administrasi (kelemahan tata usaha/ akuntansi	08			
9.	Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat	09			
10.	Temuan pemeriksaan lainnya	10			
	TOTAL JUMLAH			**100**	

Keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
4. kolom 4, berisi jumlah kejadian sesuai dengan kondisi temuan;
5. kolom 5, berisi persentase perbandingan jumlah total kejadian dibandingkan dengan jumlah masing-masing klasifikasi temuan, yaitu: total jumlah dikurangi jumlah kejadian pada masing-masing klasifikasi temuan dibagi total jumlah kali 100%; dan
6. kolom 6, berisi besar nilai dalam rupiah klasifikasi kondisi temuan.

2. Rekapitulasi.....

2. Rekapitulasi hasil pelaksanaan pra Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) BPK RI 20.. (tahun anggaran berjalan):

NO	ENTITAS	HASIL PEMERIKSAAN	HASIL PTL				KET
			JML	BS	BD	S	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
2. kolom 2, berisi Satker yang menjadi entitas pada pra PTL yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri untuk persiapan pelaksanaan PTL;
3. kolom 3, berisi rekomendasi temuan pada laporan keuangan BPK RI yang di pra PTLkan;
4. kolom 4, berisi jumlah rekomendasi BPK RI yang di pra PTLkan pada entitas dimaksud;
5. kolom 5, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Sesuai (BS) pada risalah yang disahkan oleh APIP Polri pada pelaksanaan pra PTL;
6. kolom 6, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Dipantau (BD) pada risalah yang disahkan oleh APIP Polri pada pelaksanaan pra PTL;
7. kolom 7, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Sesuai (S) pada risalah yang disahkan oleh APIP Polri pada pelaksanaan pra PTL; dan
8. kolom 8, berisi penjelasan atas rekomendasi berstatus BS dan BD.

3. evaluasi Wasrik dengan tujuan tertentu:
   1. hasil pelaksanaan verifikasi;
   2. Wasrik pada atase Polri di Luar Negeri;
   3. evaluasi operasi kepolisian:
      a) Lilin; dan
      b) Ketupat.
   4. Wasrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB); dan
   5. Wasrik Khusus (Warsiksus).

4. evaluasi reviu:
   1. atas Laporan Keuangan (Lapkeu);
   2. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL); dan
   3. revisi anggaran.

5. Hambatan.....

5. Hambatan dan Masalah

   Keterangan:

   1. berisi dalam pelaksanaan pengawasan yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan non PKPT, kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan-kegiatan penunjang akan selalu dijumpai masalah. Untuk itu masalah tersebut perlu disampaikan dalam laporan ini; dan
   2. masalah tersebut dapat berupa masalah kelembagaan, SDM, koordinasi pengawasan, keterbatasan dana dan sebagainya. Penyampaian masalah dan hambatan tersebut diharapkan dapat disampaikan secara jelas dan terinci.

BAB V
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) oleh Inspektorat Pengawasan ..... (Umum/Daerah) Tahun 20.. (tahun anggaran berjalan)

NO	KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN	KODE	JML TEMUAN	NILAI (Rp)	SESUAI		BELUM SESUAI		BELUM DIPANTAU	
					JML TEMUAN	NILAI (RP)	JML TEMUAN	NILAI (RP)	JML TEMUAN	NILAI (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
	JUMLAH									

keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
2. kolom 2, berisi klasifikasi kondisi temuan sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
3. kolom 3, berisi kode temuan sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
4. kolom 4, berisi jumlah temuan sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
5. kolom 5, berisi nilai (Rp) sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
6. kolom 6, berisi jumlah temuan pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Sesuai oleh APIP;
7. kolom 7, berisi nilai rupiah pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Sesuai oleh APIP;
8. kolom 8, berisi jumlah temuan pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Sesuai oleh APIP;
9. kolom 9, berisi nilai rupiah pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Sesuai oleh APIP;
10. kolom 10, berisi jumlah temuan pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Dipantau oleh APIP;
11. kolom 11, berisi nilai rupiah pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Dipantau oleh APIP;

2. Hasil.....

2. Hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) BPK RI 20.. tahun anggaran berjalan) dilaksanakan:

   a. pada bulan ....

NO	ENTITAS	HASIL PEMERIKSAAN	HASIL PTL				KET
			JML	BS	BD	S	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	JUMLAH						

   b. pada bulan ....

NO	ENTITAS	HASIL PEMERIKSAAN	HASIL PTL				KET
			JML	BS	BD	S	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	JUMLAH						

   Keterangan:

   1. kolom 1, berisi nomor urut;
   2. kolom 2, berisi Satker yang menjadi entitas pada PTL yang dilaksanakan oleh BPK RI;
   3. kolom 3, berisi rekomendasi temuan pada laporan keuangan BPK RI yang di PTLkan;
   4. kolom 4, berisi jumlah rekomendasi BPK RI yang di PTLkan pada entitas dimaksud;
   5. kolom 5, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Sesuai (BS) pada risalah yang disahkan oleh Auditor BPK RI;
   6. kolom 6, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Dipantau (BD) pada risalah yang disahkan oleh auditor BPK RI;
   7. kolom 7, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Sesuai (S) pada risalah yang disahkan oleh auditor BPK RI; dan
   8. kolom 8, berisi penjelasan apakah masih ada perkembangan atau telah selesai atas seluruh rekomendasi yang diberikan kepada entitas pada pelaksanaan pra PTL atau berisi penjelasan lain yang sesuai dengan yang disampaikan oleh APIP Polri.

3. Hasil.....

3. Hasil pelaksanaan pemantauan tindak lanjut (PTL) pengaduan masyarakat:

a. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah:

NO	JENIS MASALAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HUKUM/HAM		
2.	LAHGUN WEWENANG		
3.	LAIN-LAIN		
4.	KEWASPADAAN NASIONAL		
5.	PERS		
6.	PUNGLI/KORUPSI		
7.	SIDIK TP		
8.	TANAH/RUMAH		
9.	YANMAS		
	JUMLAH		

b. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber pengaduan:

NO	JENIS MASALAH	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT								JML
		DPR/ MPR	SET NEG	SET KAB	MEN NEG PAN	DEP LU RI	DEP DAG RI	DEP KUM HAM	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	HUKUM/HAM									
2.	LAHGUN WEWENANG									
3.	LAIN-LAIN									
4.	KEWASPADAAN NASIONAL									
5.	PERS									
6.	PUNGLI/KORUPSI									
7.	SIDIK TP									
8.	TANAH/RUMAH									
9.	YANMAS									
	JUMLAH									

c. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari komisi nasional:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/ HAM	LAH GUN WEWE NANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	PUNGLI/ KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/ RUMAH	YANS MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	KOMNASHAM										
2.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK										
3.	OMBUDSMAN										
4.	KPK										
5.	KOMPOLNAS										
6.	KOMNAS AKTP										
7.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

d. pengaduan.....

d. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari lembaga swadaya masyarakat:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/ HAM	LAH GUN WEWE NANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	PUNGLI/ KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/ RUMAH	YANS MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BERBAGAI LSM										
2.	KOMISI/KOMITE										
3.	PERSATUAN										
4.	KELOMPOK										
5.	FORUM/FRONT										
6.	KOALISI										
7.	GERAKAN										
8.	FEDERASI										
9.	WATCH										
10.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

e. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari lembaga bantuan hukum:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/ HAM	LAH GUN WEWE NANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	PUNGLI/ KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/ RUMAH	YANS MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	YLBHI										
2.	ORGANISASI ADVOKAT										
3.	PENGACARA										
4.	ATAS KUASA										
5.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

f. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari masyarakat/perorangan:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/ HAM	LAH GUN WEWE NANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	PUNGLI/ KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/ RUMAH	YANS MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	UMUM										
2.	PT/CV/FIRMA										
3.	PEGAWAI										
4.	TNI										
5.	POLRI										
6.	MAHASISWA										
7.	TOMAS/TOGA										
8.	ANONIM										
9.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

BAB VI.....

BAB VI
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

   Berisi ringkasan kondisi APIP (kelembagaan, SDM, dana, dan sarana), pelaksanaan tugas, hasil-hasil yang dicapai serta masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dilaporkan pada BAB II sampai dengan BAB IV dan dapat dilengkapi dengan penilaian sendiri (*self assessment*).

2. Rekomendasi

   Berisi sesuai dengan materi simpulan, maka rekomendasi dapat disusun dengan maksud memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja APIP maupun kinerja objek pengawasan. Rekomendasi agar lebih ditekankan pada upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan tugas APIP.

....., ... 20..

.....

.....
.....

Catatan:

Sebutan Inspektorat Pengawasan Umum Polri/ Inspektorat Pengawasan Daerah coret salah satu disesuaikan dengan siapa yang melaporkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI